

## ABSTRAK

PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, ada PPAT yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. PPAT dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaiannya. Tesis ini membahas tentang bagaimana implikasi hukum terhadap pemalsuan data otentik akta jual beli yang dibuat oleh PPAT, bagaimana tanggungjawab PPAT yang melakukan pemalsuan data otentik dalam membuat akta jual beli dan upaya yang dilakukan PPAT dalam mengatasi solusi terkait pemalsuan data otentik akta jual beli yang dibuat oleh PPAT.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan terhadap permasalahan yang dirumuskan dengan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan membandingkannya dengan penerapan hukum dan peraturan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluative dan argumentatif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implikasi hukum terhadap pemalsuan data otentik akta jual beli yang dibuat oleh PPAT adalah akta tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum menjadi akta di bawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang menyatakan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan. Tanggungjawab PPAT yang melakukan pemalsuan data otentik dalam membuat akta jual beli, dapat dimintakan pertanggungjawaban dihadapan hukum karena tindakannya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Upaya yang dilakukan PPAT dalam mengatasi masalah dan solusi terkait pemalsuan data otentik akta jual beli yang dibuat oleh PPAT yaitu memberikan perlindungan hukum dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) merumuskan aturan yang spesifik tentang batasanbatasan pertanggungjawaban pidana notaris dalam UUJN, (b) memperkuat kapasitas dan peran organisasi notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam peningkatan profesionalitas anggotaanggotanya dengan cara menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pembekalan dan pelatihan yang terkait dengan dunia kenotariatan secara khusus dan dunia hukum secara umum, (c) memaksimalkan fungsi dan peran Majelis Pengawas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana diamanatkan UUJN.

Kata Kunci : Tanggungjawab Pidana Notaris/PPAT, Akta Jual Beli, Pemalsuan

## ABSTRACT

*PPAT is a public official who is given the authority to make authentic deeds regarding certain legal actions regarding land rights. However, there are PPATs that do not carry out their duties and obligations properly. PPAT can be sued to be responsible for the deed that it has made, especially if the deed is legally flawed due to its negligence. This thesis discusses how the legal implications of the authentic data falsification of sale and purchase deeds made by PPAT, how is the responsibility of PPAT for making authentic data forgery in making sale and purchase deeds and the efforts made by PPAT in overcoming solutions related to authentic data falsification of sale and purchase deeds made by PPAT.*

*This research was conducted through a normative juridical approach, namely an approach to problems formulated by studying the provisions of laws and regulations relating to the problem and comparing them with the application of laws and regulations. Sources of legal materials in this study consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is a literature study technique. The analysis of legal materials used in this study was carried out in a descriptive, interpretative, evaluative and argumentative manner.*

*The results of this study indicate that the legal implication of falsification of authentic data of sale and purchase deeds made by PPAT is that the deed only has legal force to become an underhand deed and the authentic deed can be canceled if the party claiming to prove it can prove it in court. PPAT's responsibility for falsifying authentic data in making sale and purchase deeds can be held accountable before the law because their actions cause harm to others. The efforts made by PPAT in overcoming problems and solutions related to falsification of authentic data of sale and purchase deeds made by PPAT, namely providing legal protection with the following steps: (a) formulating specific rules regarding the limitations of criminal liability for notaries in UUJN, (b) strengthening the capacity and role of the notary organization of the Indonesian Notary Association (INI) in increasing the professionalism of its members by organizing socialization activities, debriefing and training related to the world of notaries in particular and the world of law in general, (c) maximizing the function and role of the Supervisory Council in carrying out the authority as referred to mandated by UUJN.*

*Keywords: Notary Responsibility / PPAT, Deed of Sale and Purchase, Counterfeiting*